

AREA MANAJEMEN ASN

Manajemen ASN

90.36 %

Tata Kelola ASN

100 %

Peningkatan Integritas dan Pengawasan

95.92 %

Budaya Antikorupsi

75 %

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	Indikator Tata Kelola ASN			
1	Sub Indikator Perencanaan & Pemenuhan SDM			
	Rencana Kebutuhan dan Pemenuhan ASN 1. Dokumen rencana penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK untuk jangka waktu 5 tahun (PP 11 Tahun 2017). 2. Dokumen usulan formasi kebutuhan PNS dan PPPK yang diusulkan oleh PPK ke Kemenpan RB. 3. Dokumen penetapan formasi	1. Dokumen rencana penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis ASN untuk 5 tahun 2. Dokumen usulan formasi kebutuhan PNS dan PPPK (CASN) diusulkan kepada KemenPANRB 3. Persetujuan Prinsip kebutuhan ASN dari Kemenpan RB 4. Laporan Pengadaan CASN 2024	Hasil verifikasi sementara 100%	-

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	CPNS dan PPPK oleh Kemenpan RB. 4. Laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK.			
2	Sub Indikator Peta Jabatan			
	Peta Jabatan & Penyederhanaan Birokrasi - Daftar Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Pemerintah Daerah dan Penyesuaian Sistem Kerja - Peta jabatan berdasarkan Anjab ABK (disusun menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas, dan kualifikasi). Evaluasi Jabatan - Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemda yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan) - Surat Penyerahan/Tanda Terima/Bukti Pengiriman Hasil Evaluasi/Kelas Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB)	A. Peta Jabatan dan Penyederhanaan Struktur Birokrasi: - Struktur Organisasi telah mengacu dalam rangka Penyederhanaan dan Penyetaraan Birokrasi, telah dilampirkan surat usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemkab Kebumen dan Surat Persetujuan dari Provinsi Jawa Tengah Nomor 061/1985 Tanggal 4 Agustus 2021 mendasari dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4498/OTDA Tanggal 9 Juli 2021 - Peta jabatan telah ditetapkan dengan keputusan PPK B. Evaluasi Jabatan - Penilaian Skor evaluasi Jabatan PD dinilai proporsional berdasarkan jumlah OPD yang sudah menyelesaikan skor	Hasil verifikasi sementara 100%	-

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	yang ditandatangani Sekda. 3. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan. Catatan: Perubahan evaluasi jabatan disesuaikan berdasarkan peraturan Kementrian mengenai struktur organisasi terbaru/terkini. Jika struktur organisasi pemda berubah maka evajab perlu disesuaikan.	evaluasi jabatan 2. Evaluasi jabatan disampaikan kepada Kemendagri untuk divalidasi 3. Hasil Evaluasi Jabatan divalidasi oleh Kemendagri Jawaban dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait Permohonan Persetujuan Hasil Evaluasi/ Kelas Jabatan Pemerintah Kabupaten		
3	Sub Indikator Sistem Informasi Kepegawaian			
	1. Data kepegawaian secara lengkap yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, dan kompetensi berbasis teknologi informasi yang dikelola secara update dan realtime (ex. SIMPEGNAS), dan Data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun yang disusun berdasarkan jabatan, pangkat, dan unit kerja. 2. Dokumen/ bukti absensi pegawai sudah	1. Data kepegawaian secara lengkap yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, dan kompetensi berbasis teknologi informasi yang dikelola secara update dan realtime dan Data pegawai yang akan memasuki masa pensiun jabatan, pangkat, dan unit kerja. 2. Dokumen/ bukti absensi pegawai sudah menggunakan/ memanfaatkan sistem elektronik terintegrasi dengan system penilaian Kinerja (e-Presensi)	Hasil verifikasi sementara 100%	-

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	menggunakan/ memanfaatkan sistem elektronik terintegrasi dengan system penilaian Kinerja. 3. Penilaian kinerja sudah menggunakan/ memanfaatkan teknologi informasi dan sudah memenuhi unsur: a. Laporan aktivitas harian ASN. b. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung. 4. Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagai pengukuran penilaian kinerja	3. Penilaian kinerja sudah menggunakan memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan aplikasi yang diberi nama e-Kinerja (Pemkab Kebumen) dan sudah memenuhi unsur: a. Laporan aktivitas harian ASN. b. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung. 4. Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagai pengukuran penilaian kinerja.		
4	Sub Indikator Promosi dan Mutasi			
	Kebijakan internal 1. Kebijakan internal (Pergub/Perbup/Perwali/SK Kepala Daerah) terkait Pola Karir. 2. Kebijakan internal (Pergub/Perbup/Perwali/SK Kepala Daerah) tentang mutasi dan promosi ke JPT, administrator, dan pengawas	(belum diverifikasi) Kebijakan Internal: 1. Telah terdapat Perkada tentang Pola Karir yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 2. Sudah terdapat Perkada tentang Promosi dan Mutasi,	Hasil Verifikasi sementara lengkap, 100%	-

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	secara objektif dan transparan (mengacu pada rencana suksesi). 3. Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JPT) Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi. (berisi a.l Surat permohonan seleksi terbuka ke Provinsi bagi Kab/Kota atau ke Pusat bagi Provinsi, SK Tim/Pansel, Hasil Seleksi, Rekomendasi pelaksanaan ujikom atau selter dari instansi berwenang) 1. Surat pernyataan dari PPK yang menyatakan bahwa pejabat yang akan di angkat dan dilantik memiliki rekam jejak jabatan yang baik. 2. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi. 3. Berita Acara Pansel dan berita acara ujikom beserta dokumen pendukungnya.	yaitu a) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 149 Tahun 2021 Tata Cara Pengisian Jab Adm dan Jab Pngawas di Ling Pemkab Kabupaten b) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2021 Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Ling Pemkab Kebumen 3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2021 Tata Cara Mutasi PNS di Lingk Pemkab Kebumen 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 146 tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Kebumen Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JPT) Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka / uji kompetensi Disdukcapil Surat pernyataan dari PPK yang menyatakan bahwa pejabat yang akan di angkat dan dilantik memiliki rekam jejak jabatan yang		

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	4. Rekomendasi hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi dari instansi berwenang. • Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JA, JP): Laporan Pelaksanaan Pengisian jabatan Administrator dan pengawas. (berisi a.l 1. Dokumen perencanaan promosi dan mutasi, kesesuaian persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, memperhatikan kebutuhan organisasi, 2. Berita Acara Tim Penilaian Kinerja (Baperjakat), 3. SK Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan).	baik		
	Indikator Peningkatan Integritas dan Pengawasan			
5	Sub Indikator Manajemen Kinerja			
	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kontrak Kinerja (untuk JPT) 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk	(belum diverifikasi) • Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT • LKJIP dan LKPJ	Hasil Verifikasi sementara 100%	-

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	pimpinan mengacu kepada: - Perencanaan strategis - Perjanjian kinerja - Organisasi dan tata kerja - Uraian jabatan 3. Laporan penilaian kinerja instansi (LAKIP dan LPPD 2023) Catatan: - Dokumen kontrak kinerja dan SKP tahun berjalan 2024. - Laporan penilaian kinerja tahun 2023.			
6	Sub Indikator Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)			
	- Penjelasan berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst - Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN - Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi,	(belum diverifikasi) 1) Peraturan Kepala Daerah terkait dengan TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja - Perbup TPP Nomor 17 Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kebumen - Perbup 61 Tahun 2022 perubahan atas Perbup Nomor 17 Tahun 2022 - Perbup 60 Tahun 2023 perubahan atas Perbup Nomor 61 Tahun 2022 - dalam Perbup TPP telah mempertimbangkan perhitungan atas kehadiran, aktivitas kinerja, dan penilaian kinerja	Hasil verifikasi sementara 88%	Realisasi Pembayaran TPP Periode Oktober - Desember 2024

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP. 4. Data realisasi TPP pegawai di tahun berjalan (2024).	- Perbup TPP telah memuat sanksi terkait kepatuhan pelaporan LHKPN, TPTGR dan pelanggaran disiplin 2) Realisasi Pembayaran TPP Periode Januari – Juni 2024 3) Simulasi pemberian TPP Pemkab Kebumen Update dokumen Pembayaran TPP bulan Juli, Agustus, September 2024		
7	Sub Indikator Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN			
	1. Laporan Hasil Reviu APIP terkait dengan Manajemen ASN Tahun 2024. Reviu diutamakan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasi, mutasi ASN (kesesuaian dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi). 2. Laporan Tindak Lanjut oleh Perangkat Daerah Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian (BKD/	LHR Manajemen ASN Tindaklanjut Reviu Manajemen ASN	Data dukung diterima. Hasil verifikasi sementara dinyatakan lengkap. Hasil Verifikasi 100%	-

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	BKPSDM/ BKPP) atas Rekomendasi Reviu Manajemen ASN yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun berjalan.			
	Indikator Budaya Antikorupsi			
8	Sub Indikator Kepatuhan LHKPN			
	Kepatuhan - Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah terkait wajib lapor) - Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif (Ketua DPRD) - Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (Direktur) Perluasan Wajib Lapor - Perkada/SK Kada perluasan Wajib Lapor yang memuat (Staf Khusus dan Ajudan) - (Nilai 25) - Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Kepatuhan Pelaporan LHKPN - Eksekutif, jumlah 93, ketepatan pelaporan 100% - BUMD, Jumlah 8, ketepatan pelaporan 100% - Legislatif, Jumlah 50, ketepatan pelaporan 100%	Hasil verifikasi sementara 50%	Mohon dilengkapi dengan dokumen: Perluasan Wajib Lapor - Perkada/SK Kada perluasan Wajib Lapor yang memuat (Staf Khusus dan Ajudan) - (Nilai 25) dalam proses - Kepatuhan Pelaporan LHKPN (Staf khusus dan Ajudan) - (Nilai 25)

No	Dokumen yang dibutuhkan	Dokumen yang telah diupload	Hasil Verifikasi	Catatan Kekurangan Dokumen
	(Staf khusus dan Ajudan) - (Nilai 25)			
9	Pendidikan Antikorupsi ASN			
	Laporan implementasi pendidikan antikorupsi kepada ASN pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mencakup: a. Materi antikorupsi b. Dokumentasi kegiatan	Laporan implementasi pendidikan antikorupsi kepada ASN yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Kebumen: a. Materi antikorupsi b. Dokumentasi kegiatan Kegiatan Bimtek Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang didalamnya juga terdapat materi antikorupsi dengan narasumber Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Kebumen, dokumentasi kegiatan terlampir dalam laporan. Dokumentasi kegiatan	Hasil verifikasi sementara dinyatakan lengkap (100%)	-